

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesepakatan global terkait Tanggung Jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai respons atas tantangan multidimensi yang mengancam stabilitas dunia, seperti meningkatnya konflik sosial, ketimpangan ekonomi, lemahnya institusi hukum, serta kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di berbagai kawasan dunia (United Nations, 2021). Dalam konteks global tersebut, konsep tanggung jawab sosial ini menjadi instrumen penting karena digunakan emiten dalam hal berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara operasional perusahaan dan kepentingan publik (Bascompta et al., 2024).

Tujuan Keberlanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri adalah gerakan pembangunan global yang dirancang sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan cakupan yang lebih luas dan komprehensif, mencakup 17 tujuan dan 169 target yang direncanakan untuk terealisasi di tahun 2030 (United Nations, 2021). SDGs 16, yang menjadi fokus penelitian ini, yang menjadi dasar perusahaan untuk membuat masyarakat yang damai dan inklusif, memastikan tidak ada yang terzholimi oleh perusahaan, dan meningkatkan perusahaan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan inklusif (United Nations, 2021).

Seiring perkembangan teori dan praktik SDGs di dunia internasional, struktur pilar SGD's juga mengalami perluasan dari tiga pilar utama ekonomi,

lingkungan, dan sosial menjadi lima pilar yang lebih komprehensif, yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan), Profit (Ekonomi), Peace (Perdamaian dan Keadilan), serta Partnership (Kemitraan) (ElAlfy et al., 2020). Perluasan ini terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya kompleksitas tantangan global yang harus direspons perusahaan. Misalnya, aspek tata kelola kini menjadi fokus penting karena terkait langsung dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan elemen inti SDGs 16 (United Nations, 2021).

Selain SDGs, salah satu pedoman global yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kegiatan keberlanjutan perusahaan adalah Inisiatif Pelaporan Global atau *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan dasar dalam mengukur kepedulian perusahaan yang mewajibkan perusahaan melakukan dan melaporkan seluruh kegiatan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan dan terukur (GRI, 2021). Keterkaitan ini menjadi penting karena tanggung jawab sosial pilar sosial yang selaras dengan GRI dapat memberikan kontribusi terukur terhadap target-target SDGs 16, terutama dalam mendukung transparansi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam lingkungan operasional perusahaan (ElAlfy et al., 2020). Dengan demikian, GRI menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana perusahaan tambang menyusun dan melaporkan strategi tanggung jawab sosial mereka sehingga dapat dianalisis tingkat kontribusinya terhadap SDGs 16.

Di tingkat internasional, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan penguatan institusi masyarakat (ElAlfy et al., 2020). tanggung jawab sosial pilar sosial mencakup kegiatan yang menekankan pentingnya pemberdayaan

masyarakat melalui peningkatan kompetensi, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai faktor pembentuk kualitas sumber daya manusia (Mahmoudi Kouhi et al., 2024). Pada industri pertambangan, program-program tersebut sering diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga, dan menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif untuk mencegah konflik sosial (Amaruzaman et al., 2022). Ketika masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan yang berlangsung di wilayahnya, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih konstruktif dan berpotensi mendukung terciptanya perdamaian sosial sesuai dengan prinsip SDGs 16 (United Nations, 2021).

Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial dalam bentuk peningkatan literasi hukum masyarakat, dukungan terhadap kelompok yang terdampak, serta penyediaan akses informasi publik dapat mendukung target Tujuan Keberlanjutan 16 mengenai akses terhadap keadilan bagi semua orang (United Nations, 2021). Penerapan tanggung jawab sosial pilar sosial juga dapat berkontribusi pada target Tujuan Keberlanjutan 16 mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat, terutama di wilayah yang terdampak oleh operasional tambang (Amaruzaman et al., 2022).

Fokus Tujuan Keberlanjutan 16 sangat relevan bagi industri pertambangan atau energi karena sektor ini memiliki sejarah panjang berinteraksi dengan berbagai isu sosial, seperti sengketa lahan, perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan, serta potensi

ketidaksetaraan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan industri dengan dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar tambang (Mahmoudi Kouhi et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan tambang memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak hanya meminimalkan dampak sosial negatif, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada stabilitas sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan lembaga lokal (Omotehinse & De Tomi, 2022). Ketika Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, peluang untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih damai dan inklusif menjadi jauh lebih besar (Amaruzaman et al., 2022).

Korelasi tanggung jawab sosial pilar sosial dalam mewujudkan stabilitas sosial menjadi semakin penting mengingat banyaknya kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah pertambangan, baik di negara maju maupun negara berkembang Omotehinse & De Tomi (2022). Amaruzaman et al., (2022) menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ketidakadilan distribusi manfaat, minimnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, serta rendahnya kesempatan masyarakat agar ikut serta dalam operasional perusahaan yang dapat mengganggu kehidupan mereka yang Dalam konteks ini, Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial berperan sebagai jembatan untuk membangun dialog, meningkatkan koordinasi antara perusahaan dan masyarakat, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Perusahaan yang menerapkan Indikator keberlanjutan terkait, secara konsisten akan lebih dapat mencegah potensi konflik, menjaga stabilitas operasional, dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (Bascompta et al., 2024). Kontribusi terhadap Tujuan

Keberlanjutan 16 dapat tercapai ketika program-program tanggung jawab sosial mampu mempengaruhi hubungan sosial dan menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai.

Di Indonesia, implementasi Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial dalam industri pertambangan menjadi sangat penting mengingat sebagian besar wilayah pertambangan berada di kawasan pedesaan atau terpencil, di mana masyarakat ini sangat bergantung kepada kekayaan alam disekitar mereka. Masyarakat di wilayah operasional tambang sering kali mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh kegiatan tambang, seperti berkurangnya lahan pertanian, perubahan struktur mata pencaharian, atau meningkatnya urbanisasi lokal (Ningtyas et al., 2022). Dalam situasi ini, perusahaan tambang dituntut untuk memiliki program Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial yang mampu memberikan solusi atas perubahan tersebut, misalnya melalui pelatihan keterampilan kerja, penguatan kelembagaan desa, dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil sebagai bentuk alternatif mata pencaharian Masyarakat. Dengan demikian, Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi dampak negatif sosial dan mendukung pencapaian tujuan Tujuan Keberlanjutan 16 (Bascompta et al., 2024).

Program tanggung jawab sosial yang tidak diselaraskan dengan kerangka global dan nasional sering kali menghasilkan kegiatan yang bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan tidak mampu menysasar akar permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan (Bascompta et al., 2024). Ketidaktepatan ini biasanya disebabkan oleh minimnya pemetaan sosial berbasis data, kurangnya pelibatan masyarakat

dalam proses perencanaan, dan terbatasnya mekanisme evaluasi dampak yang terukur dalam program tanggung jawab sosial (Fernández-Hernández et al., 2025).

Pada perusahaan tambang, kondisi ini berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan legitimasi sosial perusahaan, terutama ketika masyarakat merasa bahwa kegiatan tanggung jawab sosial tidak menjawab kebutuhan nyata mereka (Omotehinse & De Tomi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara program Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial dengan kerangka pembangunan global seperti Tujuan Keberlanjutan, serta pedoman pelaporan keberlanjutan seperti GRI, agar kegiatan tanggung jawab sosial dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih substansial terhadap pembangunan sosial masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal (GRI, 2021).

Program tanggung jawab sosial yang tidak yang tidak diselaraskan dengan kerangka global dan nasional sering kali menghasilkan kegiatan yang bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan tidak mampu menysar akar permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan (Bascompta et al., 2024). Ketidaktepatan ini biasanya disebabkan oleh minimnya pemetaan sosial berbasis data, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dan terbatasnya mekanisme evaluasi dampak yang terukur dalam program tanggung jawab sosial (Fernández-Hernández et al., 2025).

Pada perusahaan tambang, kondisi ini berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan legitimasi sosial perusahaan, terutama ketika masyarakat merasa bahwa kegiatan tanggung jawab sosial tidak menjawab

kebutuhan nyata mereka (Omotehinse & De Tomi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara program Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial dengan kerangka pembangunan global seperti SDGs, serta pedoman pelaporan keberlanjutan seperti GRI, agar kegiatan tanggung jawab sosial dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih substansial terhadap pembangunan sosial masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal (GRI, 2021).

Peran masyarakat dalam keberhasilan tanggung jawab sosial pilar sosial sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak oleh kegiatan operasional perusahaan tambang dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan (Ningtyas et al., 2022). Ketika perusahaan gagal melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial, terdapat risiko besar munculnya protes, penolakan, atau konflik sosial yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan dan menciptakan ketidakstabilan sosial yang bertentangan dengan tujuan Tujuan Keberlanjutan 16 (Omotehinse & De Tomi, 2022). Oleh karena itu, perusahaan tambang perlu menerapkan model tanggung jawab sosial yang transparan, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan (Amaruzaman et al., 2022). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pencapaian target Tujuan Keberlanjutan 16 yang menekankan partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan publik (United Nations, 2021).

Selain itu, hubungan erat antara tanggung jawab sosial pilar sosial dan pencapaian Tujuan Keberlanjutan 16 menjadi semakin kuat melalui peran

inisiatif pelaporan global GRI 205 (Anti Korupsi) dan GRI 206 (Anti Persaingan) sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan yang menekankan akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam memitigasi dampak sosial dan lingkungan (GRI, 2021). Melalui standar inisiatif pelaporan global, perusahaan dapat melaporkan indikator dampak sosial seperti kontribusi terhadap lembaga lokal, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebijakan anti-korupsi, dan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat (GRI, 2021). Semua indikator tersebut berkaitan langsung dengan target Tujuan Keberlanjutan 16 mengenai keadilan, inklusivitas, dan penguatan lembaga. Kehadiran inisiatif pelaporan global memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam merancang program tanggung jawab sosial pilar sosial yang lebih terstruktur dan terukur sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sosial perusahaan (ElAlfy et al., 2020).

Keterkaitan erat antara inisiatif pelaporan global dan tanggung jawab sosial pilar sosial menunjukkan bahwa perusahaan tambang yang ingin meningkatkan kontribusinya terhadap Tujuan Keberlanjutan 16 perlu memastikan bahwa program tanggung jawab sosial pilar sosial mereka disusun berdasarkan indikator yang relevan dari GRI. Dengan pendekatan seperti ini, perusahaan tambang dapat meningkatkan efektivitas program tanggung jawab sosial pilar sosial dan membangun indikator pengukuran yang lebih terstruktur sehingga hubungan antara kegiatan tanggung jawab sosial dan pencapaian Tujuan Keberlanjutan 16 dapat dianalisis secara empiris dalam penelitian seperti ini (Fernández-Hernández et al., 2025). Melalui pelaporan yang terstandarisasi, perusahaan dapat mengukur sejauh mana program tanggung

jawab sosial pilar sosial mereka mendukung terciptanya masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan, serta bagaimana kontribusi tersebut dapat memperkuat kelembagaan lokal sebagai bagian dari target tujuan keberlanjutan 16 (United Nations, 2021).

Menurut Ningtyas et al. (2022) Dalam konteks Indonesia, sejumlah perusahaan tambang nasional telah mulai mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan berbasis global report untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial mereka. Contohnya, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk telah memasukkan berbagai indikator sosial dalam laporan keberlanjutan mereka, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, dan penguatan institusi desa. Studi nasional yang dilakukan Ningtyas et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pelaporan perusahaan berbasis inisiatif pelaporan global cenderung memiliki program tanggung jawab sosial yang lebih sistematis dan berdampak langsung pada penguatan masyarakat lokal, yang secara tidak langsung mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan 16. Implementasi standar inisiatif pelaporan global juga dapat mendorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, terutama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan tanggung jawab sosial pilar sosial terhubung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan regulasi nasional yang berlaku (GRI, 2021).

Selain itu, hubungan erat antara Tanggung jawab sosial pilar sosial dan pencapaian tujuan keberlanjutan 16 melalui standar GRI, perusahaan dapat melaporkan indikator dampak sosial seperti kontribusi terhadap lembaga lokal, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebijakan anti-

korupsi, dan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat (GRI, 2021). Implementasi standar inisiatif pelaporan global juga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, terutama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan tanggung jawab sosial pilar sosial terhubung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan regulasi nasional yang berlaku (GRI, 2021).

Regulasi nasional di Indonesia memberikan dasar hukum seperti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Implementasi yang efektif dapat meningkatkan stabilitas sosial di wilayah operasi perusahaan, mengurangi risiko konflik, dan memperkuat legitimasi perusahaan dalam jangka panjang (Omotehinse & De Tomi, 2022). Program-program tanggung jawab sosial pilar sosial seperti pelatihan masyarakat, dialog perusahaan dan masyarakat, penguatan mekanisme partisipasi publik, dan pemberdayaan perempuan terbukti mampu menurunkan potensi konflik sosial dan meningkatkan legitimasi sosial perusahaan di komunitas lokal (Ningtyas et al., 2022). Di sektor pertambangan, aspek sosial menjadi lebih krusial karena interaksi antara perusahaan dan masyarakat sering kali lebih intens dan dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik, dengan demikian tanggung jawab sosial pilar sosial merupakan elemen strategis yang dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan target-target Tujuan Keberlanjutan 16 (Omotehinse & De Tomi, 2022).

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek lingkungan atau aspek ekonomi CSR, sementara penelitian mengenai peran Tanggung

Jawab Sosial Pilar Sosial dalam memperkuat masyarakat dan lembaga lokal masih relatif kurang dieksplorasi (ElAlfy et al., 2020). Padahal, aspek sosial merupakan elemen tertentu yang paling berkaitan dengan stabilitas sosial dan tata kelola yang baik, terutama pada industri ekstraktif yang memiliki risiko konflik sosial yang cukup tinggi (Mahmoudi Kouhi et al., 2024). Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya peluang penelitian yang penting untuk memahami sejauh mana Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial mampu mendukung tujuan Tujuan Keberlanjutan 16 pada perusahaan tambang nasional di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial Terhadap Pencapaian Tujuan Keberlanjutan Nomor 16 Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka permasalahan utama yang diangkat dalam hal ini maka akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap hasil kegiatan SDGs 16 di perusahaan tambang di Indonesia?

Rumusan masalah tersebut penting untuk dijawab agar dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara dampak kegiatan perusahaan dengan stabilitas sosial serta tata kelola yang baik dalam konteks keberlanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis pengaruh kegiatan tanggung jawab sosial Pilar Sosial terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke 16 pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan nomor 16 yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, praktis, dan kebijakan, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi CSR, khususnya Pilar Sosial, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan 16 di sektor pertambangan. Secara konseptual, penelitian ini dapat memperkuat teori Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011) yang menyatakan bahwa penciptaan nilai ekonomi dan sosial secara simultan merupakan kunci keberlanjutan perusahaan. Temuan penelitian juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan stabilitas sosial dan kelembaga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi praktisi, Skripsi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Praktisi Internal maupun Eksternal dalam menilai efektivitas pelaksanaan program

tanggung jawab sosial mereka, khususnya yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memahami pengaruh tanggung jawab sosial terhadap stabilitas sosial dan kelembagaan, perusahaan dapat merancang strategi tanggung jawab sosial yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta perusahaan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendorong sinergi antara dunia usaha dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun pedoman tanggung jawab sosial berbasis SDGs, memastikan keterpaduan antara kebijakan publik dan tanggung jawab sosial korporasi, serta memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan untuk memastikan fokus analisis tetap jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Batasan Objek Penelitian**

Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan Pertambangan yang tidak terdaftar di BEI tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian meskipun berada dalam sektor pertambangan.

b. **Batasan Dimensi CSR**

Penelitian ini hanya mengkaji tanggung jawab sosial Pilar Sosial, mencakup program yang berkaitan dengan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan dalam kemanusiaan. Pilar tanggung jawab sosial lainnya seperti ekonomi, lingkungan, perdamaian, dan kemitraan tidak diteliti karena tidak sesuai dengan fokus penelitian.

c. Batasan Indikator SDGs

Penelitian ini secara khusus berfokus pada tujuan keberlanjutan¹⁶ (Peace, Justice, and Strong Institutions). Komponen Tujuan Keberlanjutan lainnya mulai dari Tujuan Keberlanjutan¹ hingga Tujuan Keberlanjutan¹⁷ tidak dibahas secara mendalam selain dalam konteks pendukung.

d. Batasan Dokumen dan Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek dan Laporan Keberlanjutan di website masing-masing perusahaan pertambangan yang tersedia secara publik. Penelitian tidak menggunakan data internal perusahaan atau data yang tidak tersedia untuk umum.

e. Batasan Periode Penelitian

Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi pada tahun 2020–2024 untuk menyesuaikan dengan ketersediaan laporan keberlanjutan terbaru serta konsistensi data antarperusahaan.

f. Batasan Lokasi Sosial dan Operasional

Penelitian tidak mengkaji kondisi sosial di seluruh wilayah operasional perusahaan tambang secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan. Penelitian tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan masyarakat terdampak.

g. Batasan Generalisasi Penelitian

Hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan pada perusahaan tambang nasional yang terdaftar di BEI dan tidak mencerminkan seluruh perusahaan tambang di Indonesia, terutama perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan.